

Bagaimana Konsumsi Tembakau, IPM, Ketimpangan, Pendapatan dan Pengangguran Mempengaruhi Kemiskinan di Lampung?

Evan Harlan
evanharlan08@gmail.com
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

ABSTRACT

Selain isu kesehatan, merokok dan aktivitas konsumsi produk hasil tembakau lainnya juga diasosiasikan dengan peningkatan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat konsumsi produk hasil tembakau dan variabel-variabel lain seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), rasio gini, Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap peningkatan kemiskinan di Provinsi Lampung pada periode tahun 2018-2022. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat konsumsi produk hasil tembakau berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kemiskinan. IPM memiliki pengaruh negatif dan signifikan, rasio gini memiliki pengaruh positif dan signifikan. PDRB per kapita berpengaruh positif dan signifikan, sementara TPT memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertambahan tingkat kemiskinan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai tambahan bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pemerintah.

Kata Kunci : IPM; PDRB; TPT; Kemiskinan

INTRODUCTION

Menurut Todaro & Smith (2014) pembangunan ekonomi merupakan proses multidimensional yang melibatkan berbagai perubahan atas struktur sosial, masyarakat, dan lembaga nasional mencakup isu pertumbuhan, minimalisasi ketimpangan, hingga upaya penanggulangan kemiskinan.

Salah satu tujuan pembangunan adalah mengurangi tingkat kemiskinan. Hal ini sejalan dengan Tujuan pertama dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu tanpa kemiskinan (*no poverty*). Dengan mempertimbangkan kemiskinan yang masih menjadi permasalahan di berbagai penjuru dunia, pengentasan kemiskinan menjadi tujuan utama SDGs (*Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*, n.d.). Menjadikan pengentasan kemiskinan sebagai tujuan utama dilakukan dengan tujuan untuk menjamin keberlanjutan dari capaian Millenium Development Goals (MDGs).

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan, kemiskinan menjadi salah satu permasalahan utama dan mendasar yang perlu ditanggulangi dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Kemiskinan dapat berdampak ada lemahnya kualitas sumber daya manusia, yang kemudian mengurangi produktivitas dan pendapatannya yang pada akhirnya berdampak pada kemiskinan. Perlu dilakukan upaya dari pemerintah untuk melakukan formulasi kebijakan yang tepat dalam mengatasi permasalahan ini. Penelitian terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan menjadi penting untuk terus dikembangkan dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai hal-hal apa saja yang dapat mempengaruhi kemiskinan, sehingga

kedepannya dapat dilakukan formulasi kebijakan yang lebih baik dan sesuai.

Penelitian yang dilaksanakan *Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives* (CISDI) tahun 2022 menemukan bahwa belanja tembakau merupakan faktor pendorong utama dari kenaikan tingkat kemiskinan di Indonesia (Swarnata et al., 2022). Hal ini tidak lepas dari kenyataan bahwa konsumsi tembakau di Indonesia yang cukup tinggi dengan proporsi pengeluaran untuk tembakau yang signifikan. Pengalihan daya beli untuk keperluan belanja tembakau serta biaya kesehatan yang ditimbulkan akan membawa sejumlah besar penduduk ke dalam kategori miskin.

Provinsi Lampung merupakan provinsi dengan persentase penduduk perokok tertinggi di Indonesia. Pada tahun 2022, persentase merokok pada penduduk dengan usia lima belas tahun keatas mencapai 33,81%. Lampung sudah menempati posisi pertama sebagai provinsi dengan persentase merokok tertinggi sejak tahun 2019.

Selain konsumsi rokok, terdapat variabel-variabel lain yang diketahui memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat ketimpangan pendapatan, Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita hingga tingkat pengangguran telah banyak diteliti sehubungan dengan pengaruhnya terhadap tingkat kemiskinan di suatu wilayah. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel tersebut dan variabel pengeluaran untuk produk tembakau terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung.

LITERATUR REVIEW

Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang tidak memiliki harta benda ataupun pendapatan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup (Todaro & Smith, 2014). Dijelaskan lebih lanjut bahwa pengukuran kemiskinan dapat dilakukan melalui pendekatan konsep kemiskinan absolut ataupun melalui pendekatan konsep kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut merupakan situasi dimana seseorang tidak mampu atau nyaris tidak mampu memenuhi kebutuhan esensial berupa pangan, sandang, papan dan perawatan kesehatan dasar. Dengan demikian, pengukuran terhadap kemiskinan absolut dilakukan dengan mengacu kepada suatu garis yang menentukan batas kemiskinan. Sementara kemiskinan relatif merupakan konsep pengukuran kemiskinan yang tidak mengacu pada suatu garis kemiskinan.

Sedangkan BPS memandang kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang secara ekonomis untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan. Dalam melakukan pengukuran menggunakan pendekatan absolut, kemiskinan diukur dengan mengacu pada garis kemiskinan (*poverty line*). Badan Pusat Statistik (BPS) membuat garis kemiskinan dengan berpatokan kepada kemampuan dalam melakukan pemenuhan atas kebutuhan dasar (*basic needs approach*) sesuai yang ditetapkan oleh *Worldbank*. Garis Kemiskinan menggambarkan nilai rupiah pengeluaran minimal seseorang agar dapat memenuhi kebutuhan pokoknya dalam satu bulan. Garis kemiskinan makanan diukur berdasarkan pengeluaran minimal untuk memenuhi kebutuhan makan setara 2100 kilo kalori per hari untuk setiap orangnya. Sementara garis kemiskinan non makanan diukur dari pengeluaran kebutuhan non makanan minimal berupa kebutuhan sandang, perumahan, pendidikan serta kesehatan. Produk hasil tembakau merupakan salah satu dari tiga jenis Barang Kena Cukai (BKC) yang diberlakukan di Indonesia bersama

Etil Alkohol (EA) dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA). Hasil tembakau meliputi berbagai jenis olahan tembakau seperti rokok kretek, rokok putih, tembakau iris hingga jenis rokok lain serta hasil pengolahan tembakau lainnya. Pengenaan cukai terhadap produk hasil tembakau dilakukan karena jenis barang ini memenuhi beberapa kriteria seperti konsumsinya yang perlu dikendalikan, perlunya pengawasan atas peredarannya, serta konsumsinya yang dapat menimbulkan dampak negatif (Surono & Purwanto, 2018).

Konsumsi produk tembakau dipandang sebagai pengeluaran yang tidak produktif karena menyebabkan teralainya daya beli rumah tangga dari belanja barang-barang yang bersifat pokok (Swarnata et al., 2022). Hal ini terutama berlaku untuk rumah tangga yang memiliki pendapatan rendah. Di samping itu terdapat risiko penyakit kronis yang kemudian berimbas pada berkurangnya produktivitas dan meningkatnya biaya kesehatan yang dibutuhkan. Secara simultan, hal-hal tersebut dikhawatirkan dapat mengakibatkan seseorang menjadi semakin rentan terhadap kemiskinan

IPM atau *Human Development Index* (HDI) adalah suatu indeks yang digunakan untuk mengukur perkembangan kondisi sosioekonomi di suatu wilayah berdasarkan kombinasi perhitungan komponen pendidikan, kesehatan, serta pendapatan per kapita yang disesuaikan (Todaro & Smith, 2014). Peningkatan IPM dapat diartikan sebagai semakin baiknya ketiga komponen tersebut secara umum, dan berlaku sebaliknya untuk penurunan IPM.

Todaro & Smith (2014) mengartikan ketimpangan pendapatan sebagai distribusi yang tidak proporsional dari pendapatan nasional di antara rumah tangga. Cara yang umum digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan adalah menggunakan rasio gini (*gini ratio*). Rasio gini atau koefisien gini merupakan perhitungan angka agregat yang rentangnya di antara 0 (kemerataan sempurna) dan 1 (ketimpangan sempurna). Semakin tinggi nilainya, semakin besar ketimpangan pendapatan yang terjadi. Perhitungan rasio gini dilakukan secara grafis menggunakan bantuan kurva Lorenz.

Menurut BPS, PDRB per kapita merupakan nilai PDRB yang dibagi dengan jumlah penduduk pada suatu wilayah dalam periode yang ditentukan. PDRB kerap digunakan sebagai metode untuk mengukur pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. PDRB per kapita digunakan sebagai ukuran untuk mengukur tingkat kesejahteraan secara umum masyarakat di suatu daerah. Diasumsikan bahwa semakin besar nilai PDRB per kapita, semakin sejahtera pula masyarakat pada suatu daerah.

BPS mendefinisikan pengangguran sebagai penduduk yang sedang aktif mencari pekerjaan, penduduk yang sedang melakukan persiapan untuk usaha atau pekerjaan baru, penduduk yang tidak berusaha mencari pekerjaan karena sudah merasa tidak ada kemungkinan untuk mendapat pekerjaan, serta penduduk yang sudah mempunyai suatu pekerjaan tetapi belum memulai pekerjaannya. Tingkat pengangguran diukur menggunakan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap keseluruhan angkatan kerja.

Pengeluaran rumah tangga yang terkait dengan aktivitas merokok memberikan dorongan dalam proporsi yang signifikan terhadap keluarga berpenghasilan rendah ke dalam jurang kemiskinan (Liu et al., 2006). Pengeluaran ini terbagi menjadi pengeluaran langsung untuk pembelian rokok dan pengeluaran medis berlebih yang berhubungan dengan merokok. Hal senada disampaikan Almizi & Hermawati (2018) yang mengungkapkan bahwa konsumsi rokok memberikan dampak buruk baik dari sudut

pandang ekonomi ataupun dari segi kesehatan. Demikian pula yang disampaikan dari penelitian (Kurniawan, 2022) bahwa konsumsi tembakau berkontribusi meningkatkan kemiskinan dan mengurangi investasi rumah tangga di bidang pendidikan dan di bidang kesehatan.

IPM memiliki pengaruh terhadap kemiskinan yang signifikan dan negatif (Fahrika et al., 2020). Suliswanto (2010) melalui penelitiannya juga mendapatkan hasil yang serupa, yakni bahwa IPM memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Berbeda dengan kedua penelitian tersebut, Syaifullah & Malik (2017) menyimpulkan bahwa IPM berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Dahliah & Nirwana Nur (2021) juga mendapatkan hasil bahwa IPM tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan, namun penelitian ini menyarankan pemerintah untuk mengupayakan peningkatan IPM, terutama di aspek kesehatan dan pendidikan.

Ketimpangan pendapatan memiliki hubungan yang positif dan sifatnya signifikan terhadap tingkat kemiskinan (Ginting, 2016). Namun hasil yang berbeda ditunjukkan dalam penelitian Wijayanto (2016) yang menghasilkan bahwa ketimpangan memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

PDRB per kapita memiliki pengaruh yang bersifat negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin (Wirawan & Arka, 2015). Serupa dengan hasil tersebut, Anggraini (2015) juga menyampaikan bahwa PDRB per kapita secara signifikan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan, Azizah et al. (2018) juga mengungkapkan bahwa pendapatan per kapita memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan,

Pengangguran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan (Fahrika et al., 2020). Hal senada turut disampaikan oleh A. Amalia (2017). Sementara Dahliah & Nirwana Nur (2021) menyampaikan bahwa pengangguran memiliki efek positif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan. Penelitian lainnya menunjukkan bahwa pengangguran tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan (F. Amalia, 2012). Berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah disebutkan, Yacoub (2012) menyampaikan bahwa pengangguran memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

METHODS

Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif asosiatif yang bertujuan untuk menemukan hubungan antara variabel-variabel independen terhadap variabel dependen dalam rangka melakukan pengujian terhadap hipotesis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari BPS. Periode waktu sampel adalah tahun 2018 sampai dengan tahun 2021.

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat kemiskinan sebagai variabel dependen dan tingkat konsumsi hasil tembakau, IPM, rasio gini, PDRB per kapita dan tingkat pengangguran sebagai variabel-variabel independen. Definisi operasional dari variabel-variabel tersebut dapat dijelaskan sebagaimana berikut :

Perubahan tingkat kemiskinan (ΔP) diukur menggunakan perubahan persentase penduduk miskin

pada suatu kabupaten/kota dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Konsumsi produk tembakau (lnCTemb) menggunakan data rata-rata pengeluaran mingguan per kapita untuk keperluan belanja rokok dan produk tembakau lainnya. Terhadap variabel ini, diambil nilai logaritma natural (ln).

Perubahan IPM (Δ IPM) diukur dengan poin kenaikan atau penurunan IPM dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Perubahan Rasio gini (Δ Gini) diukur menggunakan perubahan nilai rasio gini dibandingkan dengan periode sebelumnya

Perubahan PDRB per kapita (Δ PDRBKap) diukur dengan persentase perubahan PDRB per kapita di kabupaten/kota terhadap PDRB per kapita tahun sebelumnya.

Perubahan Tingkat pengangguran (Δ TPT) diukur menggunakan perubahan persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap TPT periode sebelumnya.

Model dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$\Delta P = f(\ln CTemb, \Delta IPM, \Delta Gini, \Delta PDRBKap, \Delta TPT)$$

Penelitian ini menggunakan data *time series* selama 4 tahun, dari tahun 2018 – 2021 dan data *cross section* sejumlah 15 kabupaten/kota di provinsi Lampung. Data kemudian dianalisis menggunakan metode regresi data panel dengan aplikasi STATA 17.0. Model estimasi yang digunakan menjadi :

$$\Delta Pit = \alpha + \beta_1 \ln CTemb_{it} + \beta_2 \Delta IPM_{it} + \beta_3 \Delta Gini_{it} + \beta_4 \Delta PDRBKap_{it} + \beta_5 \Delta TPT_{it} + \epsilon$$

RESULTS AND DISCUSSION

Pemilihan Model Regresi Data Panel

Dalam melakukan pemilihan model regresi untuk data panel dilakukan uji Chow dengan Prob > F = 0.3143. Karena nilai probabilitas > 0.05 maka model *common effect* lebih baik untuk digunakan ketimbang model *fixed effect*.

Selanjutnya dilakukan pengujian menggunakan uji Hausman dan didapatkan Prob > chi2 = 0.0355. Dikarenakan nilai probabilitas < 0.05, sehingga model *fixed effect* dipilih ketimbang model *random effect*.

Kemudian untuk menguji antara model *common effect* dan *random effect*, dilakukan uji Lagrange Multiplier (LM). Dari pengujian tersebut didapat hasil Prob > chibar2 = 1.0000. Karena nilai probabilitas yang lebih dari 0.05, model *common effect* dipilih ketimbang model *random effect*.

Dari ketiga pengujian yang telah dilakukan, maka dipilihlah model regresi data panel dengan *common effect*.

Pengujian Asumsi Gauss-Markov

Pengujian normalitas dengan uji skewness dan kurtosis (sktest), didapatkan nilai Prob > chi2 0.4717. Karena nilai probabilitas > 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

Kemudian dilakukan pengujian untuk mengetahui apakah model mengalami permasalahan multikolinieritas. Pengujian dilakukan dengan Variance Inflation Factor (VIF). Dari pengujian tersebut didapatkan Mean VIF 1.66 (<10) sehingga model dinyatakan tidak mengalami masalah multikolinieritas.

Uji heteroskedastisitas memiliki tujuan untuk mengetahui apakah model regresi memiliki ketidaksamaan varians residual. Uji ini dilakukan dengan perintah *hettest* dan didapatkan hasil $\text{Prob} > \chi^2 = 0.4840$. Karena hasil probabilitas > 0.05 , model dinyatakan tidak memiliki permasalahan heteroskedastisitas.

Terakhir, dilakukan pengujian untuk mengetahui adanya autokorelasi dengan fungsi *xtserial*, dan didapat hasil $\text{Prob} > F = 0.0389$. Dikarenakan nilai probabilitas < 0.05 , dapat disimpulkan bahwa model mengalami permasalahan autoregresif orde pertama. Terhadap permasalahan autokorelasi ini diatasi dengan menggunakan model regresi *xtregar*. *Xtregar* cocok untuk model regresi yang memadukan *time series* dan *cross section* ketika terjadi gangguan autoregresif orde pertama. Model ini didukung oleh penelitian Baltagi & Wu (1999) serta Bhargava et al. (1982).

Pengujian Hipotesis

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, didapatkan nilai koefisien determinasi secara keseluruhan (*R-Squared overall*) sebesar 0,4055. Angka ini bermakna bahwa variabel-variabel independen menjelaskan perubahan variabel dependen sebanyak 40,55%. $\text{Prob} > \chi^2$ yang bernilai kurang dari 0.05 berarti bahwa semua variabel independen secara bersama-sama memberikan pengaruh signifikan terhadap variabel dependen, dan sebaliknya jika nilainya lebih dari 0.05 berarti variabel-variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap variabel dependen. Nilai $P > |z|$ yang kurang dari 0.05 memberikan makna bahwa variabel-variabel dependen tersebut memiliki pengaruh signifikan. Sebaliknya nilai $P > |z|$ yang lebih dari 0.05 berarti variabel-variabel tersebut tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Dari hasil pengujian, terlihat bahwa variabel tingkat konsumsi produk hasil tembakau memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung pada periode 2018-2022. Peningkatan satu persen konsumsi produk hasil tembakau berpengaruh terhadap peningkatan 0.987 persen kemiskinan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Liu et al. (2006), Almizi & Hermawati (2018) dan (Kurniawan, 2022).

Terhadap variabel IPM, hasil pengujian menunjukkan bahwa IPM memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung pada periode 2018-2022. Jika IPM meningkat satu poin, maka kemiskinan akan berkurang sebanyak 1.086 persen. Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan Fahrika et al. (2020) dan Suliswanto (2010).

Variabel rasio gini memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung pada periode 2018-2022. Peningkatan 0.1 poin rasio gini berpengaruh terhadap peningkatan kemiskinan sebesar 0.5 persen. Hasil serupa juga disampaikan Ginting (2016) melalui penelitiannya.

Sementara untuk variabel PDRB per kapita, dalam penelitian ini didapati hasil bahwa variabel ini memiliki pengaruh

positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung pada periode 2018-2022. Akan tetapi pengaruh yang diberikan kecil karena peningkatan PDRB per kapita sebesar satu persen hanya meningkatkan kemiskinan sebesar 0.03 persen. Hal ini berbeda dengan yang disampaikan dalam penelitian Azizah et al. (2018) yang menyimpulkan bahwa PDRB per kapita memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Yang terakhir, hasil pengujian menemukan bahwa variabel TPT memiliki pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung pada periode 2018-2022. Hasil ini mendukung kesimpulan yang disampaikan Dahliah & Nirwana Nur (2021).

CONCLUSIONS

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa variabel-variabel pengeluaran konsumsi produk tembakau, IPM, rasio gini, PDRB per kapita, dan TPT bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perubahan tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung pada periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Masing-masing variabel independen secara terpisah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perubahan tingkat kemiskinan kecuali variabel perubahan tingkat pengangguran terbuka.

Pengeluaran konsumsi produk tembakau, IPM dan rasio gini memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan sesuai dengan hipotesis yang telah disampaikan sebelumnya. Pengeluaran konsumsi produk tembakau, dan rasio gini memiliki pengaruh positif, sementara IPM memberikan pengaruh yang bersifat negatif. Hasil ini juga didukung oleh beberapa penelitian terdahulu yang mendapatkan hasil senada.

Sementara variabel PDRB per kapita mendapatkan hasil yang berbeda dengan hipotesis. Dalam penelitian ini PDRB per kapita memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Fenomena ini dapat mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi bersifat tidak merata, sehingga hanya sebagian kelompok yang merasakan manfaatnya. Namun hal ini dapat pula diakibatkan oleh kurangnya periode dan wilayah sampel. Variabel TPT juga mendapatkan hasil yang berbeda dengan hipotesis, dengan hasil pengaruh positif tetapi tidak signifikan. Namun terdapat penelitian terdahulu yang memberikan hasil serupa.

REFERENCES

- Almizi, M., & Hermawati, I. (2018). Upaya Pengentasan Kemiskinan Dengan Mengurangi Konsumsi Rokok Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan (Jks)*.
- Amalia, A. (2017). Pengaruh Pendidikan, Pengangguran Dan Ketimpangan Gender Terhadap Kemiskinan Di Sumatera Utara. *At-Tawassuth*, 3(3).
- Amalia, F. (2012). Pengaruh Pendidikan, Pengangguran Dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di

- Kawasan Timur Indonesia (Kti) Periode 2001-2010. *Jurnal Ilmiah Ekonosains*, 10(2).
- Angraini, F. (2015). Analisis Pengaruh Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Tingkat Pengangguran Terbuka Danpendapatan Domestik Regional Bruto Perkapita Terhadap Kemiskinan Pada Kabupaten/ Kota Di Provinsisulawesi Tengah Tahun 2010-2013. *E-Jurnal Katalogis*.
- Azizah, W. E., Sudarti, & Kusuma, H. (2018). Pengaruh Pendidikan, Pendapatan Perkapita Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur. In *Jurnal Ilmu Ekonomi* (Vol. 2).
- Baltagi, B. H., & Wu, P. X. (1999). Unequally Spaced Panel Data regressions With Ar(1) Disturbances. *Econometrics Theory*.
- Bhargava, A., Franzini, L., & Narendranathan, W. (1982). Serial Correlation And The Fixed Effects Model. *Review Of Economic Studies*.
<https://Academic.Oup.Com/Restud/Article/49/4/533/1581969>
- Bps. (N.D.-B). *Indeks Pembangunan Manusia*. Badan Pusat Statistik (Bps).
- Bps. (N.D.-B). *Kemiskinan Dan Ketimpangan*. Badan Pusat Statistik (Bps).
- Bps. (N.D.-A). *Pdrb Per Kapita*. Badan Pusat Statistik (Bps).
- Bps. (N.D.-B). *Tenaga Kerja*. Badan Pusat Statistik (Bps).
- Dahliah, D., & Nirwana Nur, A. (2021). The Influence Of Unemployment, Human Development Index And Gross Domestic Product On Poverty Level. *Golden Ratio Of Social Science And Education*, 1(2), 95–108. <https://doi.org/10.52970/Grse.V1i2.84>
- Fahrika, A. I., Salam, H., & Buhasyim, M. A. (2020). Effect Of Human Development Index (Hdi), Unemployment, And Investment Realization Toward Poverty In South Sulawesi-Indonesia. *The International Journal Of Social Science World*. <https://doi.org/10.5281/Zenodo.4080749>
- Ginting, A. M. (2016). Pengaruh Ketimpangan Pembangunan Antarwilayah Terhadap Kemiskinan Di Indonesia. *Kajian*. <http://news.bisnis.com/read/20140721/15/244928/>

- Kurniawan. (2022). Kompleksitas Permasalahan Kemiskinan Dan Lingkaran Konsumsi Tembakau Di Indonesia. *Sosio Informa*.
- Liu, Y., Rao, K., Hu, T. Wei, Sun, Q., & Mao, Z. (2006). Cigarette Smoking And Poverty In China. *Social Science And Medicine*, 63(11), 2784–2790. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2006.06.019>
- Suliswanto, M. S. W. (2010). Pengaruh Produk Domestik Bruto (Pdb) Dan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Terhadap Angka Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(2). <http://www.gatra.com>,
- Surono, & Purwanto, E. (2018). *Teknik Dan Fasilitas Cukai Kepabeanan Dan Cukai*. <http://www.bppk.depkeu.go.id>
- Swarnata, A., Kamilah, F. Z., Melinda, G., & Adrison, V. (2022). *Efek Pemiskinan Akibat Konsumsi Tembakau Di Indonesia*.
- Syaifullah, A., & Malik, N. (2017). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Produk Domestik Bruto Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Asean-4 (Studi Pada 4 Negara Asean). *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(1), 107–119.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2014). *Economic Development* (12th Ed.). Pearson.
- Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*. (N.D.). Sekretariat Nasional Sdgs.
- Wijayanto, A. T. (2016). Analisis Keterkaitan Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan Dan Pengentasan Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2000–2010. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(02).
- Wirawan, I. M. T., & Arka, S. (2015). Analisis Pengaruh Pendidikan Pdrb Per Kapita Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Provinsi. *E- Jurnal Ep Unud*.
- Yacoub, Y. (2012). Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Eksos*, 8(3), 176–185.